

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Fasilitas Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat

Aprillia Wahyuni¹, Syamsul Amar²

^{1,2} Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Indonesia

***Korespondensi:** Aprilliarakata27@gmail.com, syamsulamar3@yahoo.co.id

Info Artikel

Diterima:

21 Januari 2023

Disetujui:

11 Februari 2023

Terbit daring:

01 Maret 2023

DOI: -

Sitasi:

Wahyuni, A & Amar, S (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Dan Fasilitas Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Barat. *JKEP: Jurnal kajian ekonomi dan pembangunan*, 5(1).

Abstract

This study intends to examine the effect of government budget allocation on the allocation of education, health, housing, public facilities on HDI in West Sumatra Province. The data used in this study is secondary data from 2011 to 2020. This study uses panel data analysis techniques. The results of the analysis prove that the allocation of government costs in the allocation of education, health, housing and public facilities has a positive and significant impact on human development in West Sumatra Province. Meanwhile, the simultaneous allocation of government spending in the education, health, housing and public facilities sectors has a significant effect on the human development index in the Regency/City of West Sumatra Province

Keywords: Human development index, government spending on education, health, housing and public facilities

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk melihat pengaruh alokasi biaya pemerintah terhadap alokasi pendidikan, kesehatan, perumahan, fasilitas umum atas IPM di Provinsi Sumatera Barat. Data di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 2011 sampai 2020. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data panel. Hasil analisis membuktikan terhadap alokasi biaya pemerintah di alokasi pendidikan, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum berdampak positif dan signifikan atas pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan secara simultan alokasi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

Kata Kunci: Indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum.

Kode Klasifikasi JEL: O15, H75, P46

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia merupakan indikator yang dapat menaksir pencapaian terhadap perkembangan sosial-ekonomi bangsa yang mengombinasikan di peroleh dari pengetahuan, kesehatan dan pendapatan riil perkapita yang berlaku (Todaro, 2011:57). Indeks pembangunan manusia salah satu indikator penting dalam mengukur terwujudnya pembangunan kualitas modal manusia.

Dalam melakukan perhitungan indeks pembangunan manusia terdapat beberapa komponen penting yaitu umur panjang (kesehatan), angka melek huruf (pendidikan) dan pendapatan perkapita. Meningkatnya pembangunan manusia maka kesejahteraan manusia juga dapat meningkat hal ini tentu akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Untuk meningkatkan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat maka pemerintah setempat sangat di perlukan untuk memperhatikan dan meningkatnya HDI.

Data pembangunan manusia dari rentang tahun 2016 sampai 2019 menunjukkan peningkatan. Angka indeks pembangunan manusia pada Provinsi Sumatera Barat yang lebih rendah terdapat di tahun 2016 sebesar 70,73. Sedangkan yang paling tinggi mencapai sebesar 72,39 pada tahun 2019. Berdasarkan BPS Sumatera Barat. Pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat terdapat di peringkat 9. Sedangkan IPM di Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan cukup berbeda. Pembangunan manusia lebih rendah berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sedangkan yang lebih tinggi di Kota Padang.

Pembangunan manusia di pengaruhi sejumlah indikator. Pada analisis ini pembangunan manusia akan di pengaruhi oleh alokasi belanja publik terhadap pendidikan, kesehatan, rumah dan infrastruktur umum. Secara teori pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Bantuan dana yang di berikan pemerintah terhadap pendidikan sangat berguna dalam peningkatan mutu pendidikan masyarakat.

Kuota belanja pemerintah terhadap pendidikan dapat di gunakan sebagian membangun sekolah, melengkapi fasilitas pendidikan seperti teknologi, menambah jasa guru dan memberikan beasiswa ke pada masyarakat yang kurang mampu dan berprestasi. Hal ini dapat berimbas terhadap pembangunan manusia jika semakin banyak manusia yang meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka tingkat angka melek huruf masyarakat semakin meningkat dan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Semakin masyarakat mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah maka semakin besar pengetahuan atau skill yang di miliki masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih besar maka pendapat perkapita masyarakat juga dapat meningkat dan berdampak terhadap IPM.

Alokasi belanja pemerintah terhadap alokasi pendidikan di Provinsi Sumatera Barat cenderung mendapatkan kenaikan dari tahun 2016 sampai 2019. Pada tahun 2016 pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan sebesar Rp 147.375 juta, sedangkan angka Indeks pembangunan manusia sebesar 70,73. Sedangkan 2019 anggaran pemerintah terhadap sektor pendidikan menghadapi kenaikan jadi sebesar Rp 3.185.362 miliar dan angka indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan sebesar 72,30. Berarti semakin besar anggaran pemerintah terhadap alokasi pengetahuan akan berdampak terhadap pembangunan manusia yang mengalami kenaikan.

Angka indeks pembangunan manusia juga di pengaruhi oleh sektor anggaran pemerintah terhadap alokasi kesehatan. Anggaran dana kesehatan dari pemeritah dapat di gunakan untuk membangun rumah sakit/puskesmas, fasilitas kesehatan dan peningkatan pelayanan kesehatan buat masyarakat. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan akses untuk berobat. Kesehatan dan harapan hidup masyarakat dapat meningkat, sehingga berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Menurut penelitian (Astrid et al, 2013), dalam tujuan pembangunan nasional ada di sebutkan bahwa setiap masyarakat mempunyai hak mendapatkan tingkat kesehatan yang lebih. Oleh karena itu sehat dapat di sebut berinvestasi oleh pemerintah dari pengeluaran/biaya pembangunan untuk peningkatan SDM.

Angka indeks pembangunan manusia juga di pengaruhi oleh alokasi anggaran pemerintah terhadap alokasi perumahan dan infrastruktur umum. Anggaran dana yang di dapatkan dari pemerintah terhadap biaya perumahan dan infrastruktur umum sangat bermanfaat untuk kesejahteraan dan penunjang pembangunan ekonomi. Anggaran dana tersebut dapat di gunakan untuk membangun rumah subsidi, sehingga masyarakat dari golongan menengah kebawah dapat memiliki tempat tinggal yang layak dan pemerintah bisa menyediakan saluran air bersih dan sanitasi di setiap rumah masyarakat, sehingga tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Maka dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Pengeluaran pemerintah di sektor perumahan dan fasilitas umum juga dapat di gunakan untuk membangun fasilitas umum terutama yang berbasis ekonomi seperti sarana transportasi, jalan dan lain-lainya. Maka akan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga pendapatan perkapita masyarakat meningkat. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat akan dapat meningkatnya indeks pembangunan manusia. Menurut Prsetyo (2017) dalam penilitan (Muhammad et al, 2020), menyatakan bahwa menyediakan pelayanan terhadap alokasi rumah dan infrastruktur umum dapat mempengaruhi terhadap peningkatan ekonomi.

Todaro (2011), human capital salah satu pemodal yang komersial kepada masyarakat mencakupi ilmu keterampilan, gagasan, wawasan yang di miliki dan alokasi yang cenderung di dapatkan dari anggaran terhadap pengetahuan, program pelatihan dalam dunia kerja dan Kesehatan. UNDP tahun 1990 (dalam wahyuningsih, 2019), menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia salah satu upaya dalam menganalisis pembangunan sosial ekonomi, baik di negara sedang berkembang atau negara maju. Dalam teori HDI menjelaskan jika pentingnya keunggulan modal human dan SDM sudah termasuk dalam indeks pembangunan manusia.

Menurut Todaro (2011), indeks pembangunan manusia meningkatkan sesungguhnya pembentukan manusia dalam artian yang lebih tidak hanya memperoleh penghasilan yang tinggi, akan tetapi pendidikan dan kesehatan merupakan masukan terhadap fungsi produksi nasional dalam peran sebagai indikator kapital manusia yang berarti investasi yang bermanfaat terhadap SDM. kenaikan kesehatan dan pengetahuan adalah tujuan tersendiri yang sangat penting dalam pertumbuhan. Indeks pembangunan manusia di peroleh dari beberapa komponen penting yaitu Pendidikan, harapan hidup (kesehatan) dan pendapatan perkapitan.

Menurut teori Rostow dan Musgrave, mengenai hubungan perkembangan pengeluaran pemerintah terhadap beberapa tahapan dalam proses pembangunan ekonomi yang pertama tahap awal dalam perkembangan ekonomi dengan jumlah investasi pemerintah cukup tinggi di sebabkan dalam tahap ini pemerintah sangat perlu membuat infrastruktur seperti kesehatan, pendidikan, sarana transportasi dan lain-lain. Tahapan pertengahan pemerintah berperan besar karena pada tahap ini perkembangan ekonomi menimbulkan hubungan yang rumit antar sektor. Pada tahap selanjutnya dalam pembangunan ekonomi, pemerintah lebih menyediakan bangunan ke anggaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program kesehatan (Mangkoesoebroto,1993).

Teori Wagner, menyampaikan dalam pertumbuhan pendapatan riil akan menyebabkan meningkatnya elastisitas pendapatan terhadap barang-barang publik seperti pendidikan dan kesehatan, dimana penyediaan barang-barang publik tersebut oleh pemerintah di pandang akan lebih efisien di bandingkan swasta (Wahyuningsih, 2019:206). Menurut wahyuningsih (2019), Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan termasuk ke dalam prinsip asas perkembangan, dimana manusia sebagai makhluk biologis dan berbudaya yang selalu membutuhkan perkembangan atau kemajuan secara kualitatif maupun kuantitatif seperti kebutuhan makanan, pendidikan dan kesehatan.

Menurut (Putri, Zamhuri dan Fattah, 2018), belanja pemerintah terhadap alokasi pendidikan menyebabkan meningkatnya peningkatan ekonomi daerah dengan ditandai pendapatan perkapita masyarakat yang semakin meningkat. Menurut Danim (2003), terdapat dua kebijakan pemerintah dalam mewujudkan ekuitas pendidikan dasar yang pertama membukak peluang secara luas dan adil bagi anak untuk di terima di lembaga. Kedua menyediakan anggaran bagi inisiatif untuk keadilan dengan ukuran khusus secara material pendidikan, sehingga peserta didik dapat memperoleh pembelajaran secara aktif pada sistem sosial dan kelembagaan ekonomi.

Menurut UUD 19945 pasal 28 H ayat 1 dan 2, menyatakan di setiap manusia memiliki hak untuk hidup yaman secara lahir dan batin , mempunyai rumah, memiliki lingkungan yang sehat dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Kesehatan termasuk salah satu hak azasi manusia karena kesehatan merupakan dasar untuk diakui derajat manusia.

Menurut penelitian (Razmi et al, 2012), biaya belanjapemerintah di alokasi kesehatan sama dengan biaya belanja pemerintah di alokasi pendidikan di mana dapat meningkatkan kualitas dan harapan hidup panjang. Anggaran pemerintah terhadap alokasi kesehatan sehingga menghasilkan promosi kesehatan masyarakat dan saluran akumulasi modal kesehatan masyarakat dan berdampak terhadap modal manusia dan pertumbuhan ekonomi sehingga berpengaruh terhadap pembangunan manusia.

Analisis Muhammad et al (2020), Anggaran publik di alokasi perumahan dan infrastruktur umum akan di rasakan manfaatnya cara langsung. Dimana manusia yang termasuk dalam ekonomi menengah kebawah akan mendapatkan rumah yang layak dan fasilitas umum akan berpengaruh terhadap perkembangan wilayah dan aktivitas produksi.

Menurut Supalmoko (2002:119), rumah salah satu kebutuhan pokok yang harus di penuhi oleh manusia. Rumah yang sehat dan yaman akan memberikan dampak yang luas terhadap kesehatan dan para penghuninya baik secara jasmani maupun rohani dan akan mendatangkan ketenangan dan membuat setiap individu yang tinggal di rumah akan lebih produktif dalam kegiatan ekonomi. Sehingga akan berpengaruh kepada pembangunan manusia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan data panel yang di mulai dari tahun 2011 sampai 2020 dan persamaan regresi yang di gunakan yaitu:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + U_{it} \quad (1)$$

Dimana Simbol Y adalah IPM, X1 alokasi belanja publik terhadap pendidikan, X2 alokasi belanja pemerintah terhadap kesehatan, X3 alokasi anggaran pemerintah terhadap perumahan dan fasilitas umum, β Konstanta, U adalah eror term.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah di lakukan analisis regresi panel bahwa Random Efect Model yang di gunakan dalam penelitian ini. Dari Tabel 1 dapat di lihat bahwa hasil analisis di peroleh nilai R² sebesar 0.662277 atau 66,22%. Hal ini menyatakan bahwa 66,22% indeks pembangunan manusia di Sumatera Barat dikontribusikan oleh kuota belanja pemerintah dipendidikan, kuota belanja pemerintah di kesehatan, kuota pengeluaran belanja di perumahan dan fasilitas umum. Sedangkan sisanya 33,78 % lagi akan di tentukan oleh variabel lain yang tidak di masukkan dalam penelitian.

Uji F dilakukan dapat melihat dampak anggaran pemerintah di sektor pendidikan, anggaran pemerintah di sektor kesehatan, anggaran pemerintah di sektor perumahan dan infrastruktur umum secara bersama-sama ke indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil estimasi di ketahui bahwa nilai probabilitas F-statistik $0.000000 < 0,05$ yang berarti bahwa terdapat pengaruh dengan signifikan setiap variabel bebas anggaran pemerintah di alokasi pengetahuan/pendidikan, anggaran pemerintah di alokasi kesehatan dan belanja pemerintah di sektor perumahan dan faislitas umum secara bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Hipotesis pertama di peroleh nilai probabilitas $0.0035 < 0,05$ maka dapat pengaruh signifikan antara belanja pemerintah di alokasi pendidikan kepada pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat. Hipotesis kedua di peroleh nilai probabilitas $0.00 < 0,05$ maka dapat pengaruh signifikan antara belanja pemerintah di alokasi kesehatan terhadap pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat. Hipotesis ketiga di peroleh nilai probabilitas $0.0000 < 0,05$ sehingga mempunyai pengaruh signifikan antara pengeluaran pemerintah di sektor perumahan dan fasilitas umum terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Data Panel Dengan Random Effect Model

Dependent Variable: Y			
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)			
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic
C	66.32817	1.344134	49.34640
X1	0.003410	0.001154	2.954866
X2	0.014355	0.001248	11.50070
X3	0.010300	0.001578	6.528594
R-squared	0.662277	Mean dependent var	3.560993
Adjusted R-squared	0.656830	S.D. dependent var	1.568589
S.E. of regression	0.918890	Sum squared resid	157.0507
F-statistic	121.5827	Durbin-Watson stat	1.019461

Sumber: Hasil Olahan Data Eviews 10, 2022

Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap indeks pembangunann manusia

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan bahwa belanja pemerintah di aloaksi pendidikan berdampak positif dan signifikan kepada IPM di provinsi Sumatera Barat. Dengan artian meningkatnya belanja pemerintah di alokasi pendidikan di Provinsi Sumatera Barat maka angka indeks pembangunan manusia juga akan mengalami peningkatan.

Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa sama dengan teori. Dimana belanja pemerintah terhadap alokasi pendidikan dapat di gunakan sebagai perkembangan mutu pendidikan masyarakat, anggaran tersebut dapat digunakan untuk membangun fasilitas sekolah, melengkapi fasilitas pendidikan seperti teknologi dan memberikan beasiswa terhadap masyarakat yang kurang mampu dan berprestasi. Maka hal ini dalam peningkatan keunggulan pendidikan masyarakat dan memperkembangkan ilmu pengetahuan masyarakat. Sehingga tingkat aksara/melek huruf dan kualitas pendidikan masyarakat meningkat maka akan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Wahyuningsih (2019), menyebutkan belanja publik terhadap alokasi pendidikan termasuk prinsip asas perkembangan, dimana manusia termasuk dalam makhluk biologis dan berbudaya yang akan selalu membutuhkan perkembangan atau kemajuan secara kualitatif maupun kuantitatif misalkan kebutuhan makanan, pendidikan dan kesehatan.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Mohammad Imdadul Haque dan Riyazuddin Khan 2019). Yang menjelaskan bahwa pengeluaran pendidikan salah satu faktor penting dalam berkontribusi terhadap IPM. Dalam penelitian menunjukkan bahwa terjadinya perubahan 1% dalam pengeluaran pendidikan maka meningkatnya 10% poin dalam IPM.

Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan Terhadap Angka Indeks Pembangunan Manusia

Dalam hasil uji hipotesis telah dilaksanakan bahwa belanja pemerintah terhadap kesehatan berdampak positif dan signifikan kepada pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat.

Oleh karena itu semakin meningkatnya belanja pemerintah terhadap kesehatan di Provinsi Sumatera Barat maka angka indeks pembangunan manusia juga akan mengalami kenaikan.

Belanja pemerintah terhadap kesehatan dapat di gunakan dalam membangun rumah sakit/puskesmas di daerah terpencil, melengkapi fasilitas kesehatan, menambah jasa tenaga medis dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Hal ini akan dapat di rasakan oleh masyarakat sehingga dapat terjaganya kesehatan masyarakat dan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. Sehingga harapan hidup masyarakat dapat meningkat dan berdampak kepada HDI. Penelitian ini sejalan dengan pemikiran Razmi (2012), biaya pengeluaran pemerintah kesehatan sama dengan biaya pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan dan sumber daya manusia dapat menimbulkan keunggulan dan harapan hidup panjang.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Mohammad Javad Razmi et al, 2012) hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara belanja kesehatan pemerintah dengan indeks pembangunan manusia, karena pengeluaran kesehatan melalui modal sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi efisien terhadap indeks pembangunan manusia di karenakan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Pengeluaran Pemerintah di Sektor Perumahan dan Fasilitas Umum Terhadap Angka Indeks Pembangunan Manusia

Dari hasil uji hipotesis yang telah dilakukan terdapat belanja pemerintah terhadap perumahan dan infrastruktur umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berarti semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah di sektor perumahan dan fasilitas umum di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat maka angka indeks pembangunan manusia juga akan mengalami peningkatan.

Anggaran pemerintah ke alokasi rumah dan infrastruktur umum dapat di gunakan untuk pembangunan rumah subsidi sehingga masyarakat dari kalangan menengah kebawah dapat merasakan dan memiliki rumah yang layak. Sehingga masyarakat dapat sejahteraah dan semangat dalam melakukan produktivitas. Dan anggaran tersebut juga dapat di gunakan untuk membangun fasilitas umum seperti jalan, irigasi dan sarana transportasi. Sehingga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan ekonomi. Meningkatnya produktivitas masyarakat maka pendapatan perkapita masyarakat meningkat sehingga berdampak terhadap IPM. Hal ini sejalan oleh pemikiran Idris (2016), mengatakan bahwa akses fasilitas umum merupakan suatu hal yang sangat dapat meningkatkan produktivitas masyarakat di suatu negara.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Muhammad Ade dan LiLi Indrawati, 2020). Memperoleh realisasi anggaran pemerintah daerah untuk rumah dan infrastruktur umum dengan cara batas signifikan 0,05% berdampak kepada pembangunan manusia kabupaten Cianjur tahun 2014-2019. Hal ini bukti serta pemerintah dalam mengotimalkan realisasi anggaran daerah agar pembangunan manusia meningkat dengan meningkatkan membangun rumah masyarakat dan infrastruktur umum seperti sarana transportasi, jalan, jaringan irigasi dan air bersih.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat di ambil beberapa kesimpulan yaitu: bahwa dengan parsial belanja pemerintah di alokasi pendidikan mempunyai dampak positif dan signifikan kepada pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat, ketika anggaran pemerintah terhadap pendidikan mengalami kenaikan maka angka indeks pembangunan manusia juga mengalami kenaikan. Cara parsial pengeluaran publik di alokasi kesehatan

berdampak positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Sumatera Barat artinya ketika belanja pemerintah di sektor kesehatan mengalami kenaikan maka angka indeks pembangunan manusia juga mengalami kenaikan. Secara spasial pengeluaran pemerintah di alokasi perumahan dan fasilitas umum berdampak positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat artinya ketika belanja pemerintah di alokasi perumahan dan fasilitas umum mengalami kenaikan maka angka indeks pembangunan manusia juga mengalami kenaikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Amar Kumar Mohanty, dkk. 2016. *Does Infrastructure Affect Human Development? Evidences From Odisha India*. Journal Of Infrastructure Development. 84,1-26.
- Aulia Nouval Putra, dkk. 2019. *Analisis Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan, Pendidikan Dan perumahan/Fasilitas Umum Terhadap Pembangunan Manusia*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatul Yogyakarta.
- Agus Tri Basuki, dkk. 2016. *Analisis faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2008-2014 (Studi Kasus Kab/Kota di Yogyakarta)*. Buletin ekonomi. Vol 14. Nol 1.
- Agus Tri Basuki, dkk. 2015. *Analisis Komposisi Pengeluaran Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Mendukung Good Governance Dalam Memasuki MEA (Studi Empiris Provinsi Di Indonesia Tahun 2010-2014)*.
- Badan Pusat Statistik. Indeks Pembangunan Manusia 2020
- Cordelia Onyinyechi Omodera. 2019. *Government General Spending and Human Development, A Case Study Of Nigeria*. Academic Journal Of Interdisciplinary Studies. Vo 8.
- Danin, Sudarwan. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. CV Pustaka Setia: Bandung.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Setelah TA 2006. (<http://www.jpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>)
- Fatimah, dkk. 2015. *Peranan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur Dalam Peningkatan Kualitas penduduk*. Artikel Ilmiah Mahasiswa.
- Heru Kusharjonto and Donghum Kim. 2011. *Infrastructure and human development: The Case Of Java, In donesia*. Journal Of the Asia Pacific Economy. 16, 111-124.
- Hikmah Jummansnir Rahmadhan. 2019. *Pengaruh Kemahalan Kontruksi, Kemandirian Fiskal, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pembangunan Manusia*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Idris, A. 2016. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Jeet Bahadur Sapkata. 2015. *Infrastructure Access and Human Development: Cross-Country Evidence and Post-2015 Development Strategies*. Faculty Of Humanities.
- Khairul Rizal, dkk. 2021. *Pengaruh Nilai Tukar Petani, Pengeluaran Pemerintah Untuk kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat*. Gorontalo Development Review. Vo 4.
- Meylina Astrid, dkk. 2013. *Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pmbangunan manusia di Indonesia*. Vo 1,1.
- Mohammad Javad Razmi. 2012. *Investigating the Government Health Expenditure on HDI In Iran*. Ferdowsi University of Mashhad-Iran.
- Mohammad Imdadul Haque, dkk. 2019. *Role Oil Production and Government Expenditure In Improving Human Development Index: Evidence From Saudi Arabia*. International Journal Energy Economics and Policy. 9, 251-256.
- Muhammad Ade, dkk. 2020. *Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Perumahan Dan Fasilitas Umum Terhadap IPM (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Cianjur)*. Indonesia Accounting Research Journal. Vol 1. No 1.
- Muhammad Zila Hamzah, Renny Risqiani, Eleonora Solfida. 2012. *Human Development Quality and Its Problem Indonesia*. OIDA international Journal of Sustainable Development. 05:07.
- Nanangfattah DR. 2009. *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.

- Nurvadila Putri. 2018. *Pengeluaran Pemerintah Indeks Pembangunan Manusia di Kota Makassar*. Journal Analisis. 7, 64-69.
- Nurlaila Hanum, dkk. 2020. *Analisis Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan Dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Aceh Tamiang*. Jurnal Samudra Ekonomi. Vol 4. No 2.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pengelolaan keuangan Daerah*.
- Pratomo Widodo, dkk. 2019. *Government Spending On Enducation, Healt and Minimum Wages As Predictors Of Human Development Index:Study Of Selected Provinces Of Indonesia*. 1, 99-101.
- Setiawan, samhis. *Pendapatan Perkapita Adalah*. Deepublis: Gurupendidikan.com, 1 juli 2021.<https://penerbitbukudeepublish.com/contoh-daftar-pustaka/>
- Supalmoko,M. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah* Edisi Pertama. Andi Affset:Yogyakarta.
- S Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Todaro, Michael P dan Smith, Stephen C. 2011. *Pembangunan Ekonomi* Edisi Kesebelas Jilid 1. Erlangga: Jakarta.
- Vanya Karunia Mulia Putri.*Pendapatan Per Kapita: Fungsi, Komponen Dan Cara Menghitung*. Deepublis: Kompas. Com, 1Juli 2021.
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/01/125017369/pendapatan-per-kapita-fungsi-komponen-dan-cara-menghitung?page=2>)
- Wahyuningsih, Tri. 2019. *Ekonomi Publik*. PT. Rajagrufindo Persada: Depok.